



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN



BULETIN

KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

1

OKTOBER 2025



PANCASILA PEREKAT BANGSA
KEMENKUM KALSEL



KEMENKUM KALSEL
DORONG UMKM NAIK KELAS



KEMENKUM KALSEL IKUTI
EVALUASI PEMBANGUNAN ZI

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Pelantikan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di Kanwil Ditjenpas Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, menghadiri kegiatan pelantikan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalsel Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) pada Senin (29/9), bertempat di Aula Kanwil Ditjenpas Kalsel.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan, Mulyadi, yang secara resmi melantik para pejabat baru untuk mengemban tugas di kantor wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan.

Dalam rangkaian acara, Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, turut hadir sebagai saksi prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan. Kehadirannya menjadi representasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan peneguhan sumpah jabatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan pengangkatan. Seluruh pejabat yang dilantik kemudian mengucapkan sumpah/janji jabatan dengan khidmat, disaksikan para pejabat struktural dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Mulyadi menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, serta komitmen dari pejabat yang baru dilantik. Ia berharap para pejabat dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kinerja organisasi.

Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara sumpah/janji jabatan oleh pejabat yang dilantik, yang turut disaksikan oleh Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel bersama jajaran lainnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel terus menunjukkan dukungan penuh terhadap sinergi antar instansi pemasarakatan di wilayah Kalimantan Selatan.



Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hadiri Apel Penyerahan Pasukan Alih Kodal Korem 101/Antasari

Banjarbaru, Yankum_Info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah pada Apel Penyerahan Pasukan Alih Kodal Korem 101/Antasari dari Kodam VI/Mulawarman kepada Kodam XXII/Tambun Bungai, Senin (29/09).

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, ini diawali dengan tradisi penerimaan Pangdam XXII/Tambun Bungai pada pukul 07.00 WITA. Selanjutnya dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Alih Kodal pada pukul 07.30 WITA yang diikuti jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, serta kepala daerah se-Kalimantan Selatan.

Alih Kodal atau alih komando ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan efektivitas komando kewilayahan. Dengan terbentuknya Kodam XXII/Tambun Bungai, wilayah komando yang sebelumnya berada di bawah Kodam VI/Mulawarman kini dipisahkan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tujuan utama pembentukan Kodam baru adalah memperpendek rentang kendali komando, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kemampuan respons terhadap potensi ancaman di wilayah.

Meidy Firmansyah menyampaikan bahwa kehadiran Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel merupakan wujud sinergi dan dukungan terhadap TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di daerah.

“Momentum alih komando ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antarinstansi, termasuk dalam aspek penegakan hukum dan pelayanan publik,” ujarnya.

Usai apel gelar pasukan, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, serta ditutup dengan tradisi pelepasan Pangdam VI/Mulawarman.

Apel Penyerahan Pasukan Alih Kodal ini diharapkan semakin mempererat hubungan kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan demi terciptanya suasana kondusif untuk mendukung pembangunan daerah.



Kanwil Kemenkum Kalsel Lanjutkan Layanan Hukum di Hari Kedua Bamara Fair 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali hadir memberikan pelayanan hukum pada hari kedua pelaksanaan Bamara Fair 2025, Minggu (28/9/2025), yang berlangsung di halaman Ex Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel pada pameran dan festival yang digelar Pemerintah Kota Banjarmasin ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik masyarakat umum, pelaku usaha, maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Melalui stan layanan hukum, tim Kanwil Kemenkum Kalsel menyediakan berbagai fasilitas pelayanan, di antaranya berupa pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Ada pula layanan konsultasi hukum gratis, khususnya terkait perlindungan kekayaan intelektual serta legalitas dokumen usaha maupun kelembagaan.

Antusiasme pengunjung terlihat dari banyaknya interaksi di stan layanan, di mana masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi langsung terkait persoalan hukum dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Melalui partisipasi dalam Bamara Fair 2025, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek legal dalam berbagai sektor, khususnya dalam mendukung kegiatan usaha dan pengembangan organisasi.



Bamara Fair 2025 Hari Ketiga, Kemenkum Kalsel Lanjutkan Pelayanan Hukum untuk Masyarakat



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus hadir memberikan layanan hukum bagi masyarakat pada hari ketiga pelaksanaan Bamara Fair 2025 yang berlangsung di halaman Ex Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (29/9/2025).

Melalui stand layanan, Kanwil Kemenkum Kalsel menyediakan fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) serta Administrasi Hukum Umum (AHU) yang terbuka untuk masyarakat umum, pelaku usaha, hingga perangkat daerah Kota Banjarmasin. Tim pelayanan hukum memberikan penjelasan seputar prosedur dan persyaratan pendaftaran merek, desain industri, paten, hingga hak cipta. Selain itu, juga disampaikan informasi mengenai pengelolaan izin usaha dan pendaftaran badan hukum.



Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat, pelaku IKM/UMKM, hingga rombongan mahasiswa dari Politeknik Negeri Banjarmasin yang turut hadir. Pameran juga diramaikan dengan beragam produk lokal unggulan UMKM seperti kain sasirangan, kriya, olahan pangan, serta pertunjukan fashion show yang menambah semarak acara.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, berkesempatan meninjau langsung jalannya kegiatan dan menyampaikan dukungan penuh terhadap partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan hukum.



Bamara Fair 2025 tidak hanya menjadi ruang promosi UMKM, tetapi juga menggabungkan unsur pelayanan publik dan hiburan budaya dalam satu event besar yang inklusif. Momentum ini diharapkan mampu mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, memperkuat identitas lokal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum di berbagai bidang kehidupan.

Sinergi Kemenkum Kalsel dan Pemkab Tapin, 126 Desa dan 9 Kelurahan Kini Miliki Posbankum

Tapin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menghadiri kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Desa/Kelurahan sekaligus Sosialisasi Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Kabupaten Tapin, Senin (29/09). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Tapin tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tapin.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, dalam sambutannya menegaskan bahwa Posbankum hadir untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat hingga ke tatanan desa dan kelurahan. Menurutnya, kehadiran Posbankum menjadi instrumen penting dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum masyarakat di tingkat akar rumput.

“Di dalam Posbankum ini, masyarakat dapat memanfaatkan empat layanan utama, yakni informasi hukum, konsultasi hukum, layanan mediasi, serta rujukan advokat,” jelas Alex.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tapin yang berhasil membentuk Posbankum di 100% wilayah administratifnya, mencakup 126 desa dan 9 kelurahan. Hal ini, menurut Alex, mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan akses keadilan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Bupati Tapin, H. Juanda, menyatakan dukungan penuh terhadap program yang diinisiasi Kementerian Hukum ini. Ia menekankan komitmennya untuk memastikan layanan Posbankum berjalan maksimal dengan dukungan sumber daya paralegal di dalamnya.

“Kami berharap adanya kolaborasi lebih lanjut bersama Kanwil Kemenkum Kalsel terkait penguatan pembinaan pelayanan Posbankum,” ujarnya.

Secara regional, progres pembentukan Posbankum di Kalimantan Selatan hingga saat ini telah mencapai 62,53% atau 1.260 Posbankum dari total 2.015 desa/kelurahan.

Kegiatan peresmian di Tapin ditutup dengan penyerahan SK Posbankum dan Surat Tanda Register Posbankum, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pelayanan Posbankum desa/kelurahan di lingkungan Kabupaten Tapin. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Kontributor: Div PPPH, Ed: Joel/Eko)



Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong UMKM Barito Kuala Naik Kelas Lewat Pelatihan Legalitas dan Kekayaan Intelektual



Barito Kuala, KI_Info – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan menyelenggarakan Pelatihan UMKM bertema “Melalui UMKM Baiman, UMKM Barito Kuala Naik Kelas, Legalitas Menjadi Tuntas” pada Senin (29/09/2025) di Rumah UMKM Handil Bakti. Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, para pelaku UMKM, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Tim Layanan Kekayaan Intelektual.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala, Hery Sasmita, yang menegaskan pentingnya legalitas dan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Ida Elsha Nastiti selaku Analis Permohonan Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkum Kalsel bertindak sebagai narasumber. Ia menjelaskan mengenai peran penting perlindungan Kekayaan Intelektual dalam memperkuat daya saing UMKM, mulai dari pengertian dasar hingga manfaat praktis yang diperoleh ketika produk memiliki perlindungan hukum. Ia juga menguraikan prosedur pendaftaran merek beserta tips agar pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesi berikutnya diisi oleh Tri Adji Prasetya Wibowo dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala yang membawakan materi mengenai aspek hukum serta penegakan aturan yang harus diperhatikan UMKM dalam menjalankan usahanya. Melalui materi yang disampaikan oleh kedua narasumber ini, para peserta mendapatkan wawasan menyeluruh mengenai pentingnya legalitas sebagai fondasi dalam mengembangkan usaha.

Pelatihan berlangsung interaktif dengan diskusi dan tanya jawab yang disambut antusias oleh para pelaku UMKM. Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel melalui Tim Layanan Kekayaan Intelektual diharapkan mampu mendorong UMKM Barito Kuala untuk naik kelas, memiliki daya saing, serta lebih percaya diri dalam memperluas pasar dengan dukungan perlindungan hukum yang kuat.



Supervisi Pagu Anggaran 2026: Transparan, Efisien, dan Tepat Sasaran Program dan Kegiatan Kanwil Kemenkum Kalsel

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Supervisi Tindak Lanjut Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (30/09/2025) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, yang bertujuan memastikan penyusunan alokasi anggaran tahun 2026 berjalan lebih berkualitas, transparan, dan tepat sasaran.

Supervisi di Kanwil Kemenkum Kalsel dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, Tim dari Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen Kementerian Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha Rustam Sakka, serta jajaran pejabat manajerial.

Dalam pelaksanaan supervisi, Tim Biro Perencanaan mendampingi penyusunan RKA-K/L dengan fokus pada verifikasi dan kepatuhan dokumen, kesesuaian perencanaan kinerja dengan postur anggaran, kelengkapan dokumen pendukung, serta pemenuhan standar biaya. Kegiatan ini juga menekankan prinsip *spending better*, yaitu belanja yang lebih efisien, berorientasi hasil, dan mendukung prioritas reformasi birokrasi serta layanan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa supervisi bukan hanya kegiatan administratif.

“Supervisi ini bagian penting dari upaya kita memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan mampu mendukung peningkatan kinerja layanan hukum di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kakanwil menekankan agar setiap divisi dan bidang berperan aktif dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta Kalender Kerja sesuai ketentuan. Dengan demikian, program kerja tahun 2026 dapat berjalan efektif dan sesuai target.

Sementara itu, Kabag TU Rustam Sakka menyampaikan bahwa kehadiran Tim Biro Perencanaan sangat membantu dalam menyelaraskan dokumen anggaran agar sesuai dengan kebijakan kementerian dan kebutuhan Kanwil di lapangan.

Dengan adanya supervisi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap dapat menghasilkan dokumen anggaran yang akuntabel, mendukung pencapaian kinerja kementerian, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Penutupan Bamara Fair 2025

Banjarmasin, Yankum_Info – Bamara Fair 2025 yang berlangsung selama empat hari, mulai 27 hingga 30 September 2025, resmi ditutup pada Selasa (30/09/2025) di Halaman Ex Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam momen penutupan tersebut yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Acara penutupan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin, para camat se-Kota Banjarmasin, Kepala Cabang Bank Kalsel, Kepala Bulog Kalimantan, Sekda Dekranasda Kota/Kabupaten, serta berbagai tamu undangan lainnya.

Tahun ini, Bamara Fair menghadirkan 130 IKM dan UMKM dari sektor kriya, fashion, dan kuliner, serta 14 stand Dekranasda kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 19 instansi yang membuka layanan publik, dengan total 919 layanan diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga mencatatkan pendapatan penjualan sekitar Rp487 juta dari transaksi produk UMKM dan IKM selama pameran.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, secara resmi menutup kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan yang berjalan sukses. Penutupan dirangkaikan dengan pemberian penghargaan bagi stand terbaik serta ditutup dengan penampilan seni tari Hantam Mandau dari Sanggar Seni Kota Banjarmasin.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam Bamara Fair 2025 menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sektor UMKM dan IKM, sekaligus mendekatkan layanan publik kepada masyarakat.



Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Ranperda RPPLH Kabupaten HSS, Kolaborasi Bersama Akademisi



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Selasa (30/9/25).

Rapat yang digelar di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjahtul Mardhiah, beserta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hadir Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERA KPLH), Ronaldy Prana Putra, bersama jajaran. Turut hadir pula Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, M.Si selaku Peneliti Utama LPPM Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom sebagai Pembantu Peneliti LPPM ULM, serta Latifah selaku Kepala Bidang PPPLH. Turut berhadir juga pada kesempatan ini perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rapat harmonisasi ini membahas keselarasan Ranperda RPPLH dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memastikan substansi muatan peraturan daerah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta daya dukung dan daya tampung wilayah.

Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, menegaskan pentingnya proses harmonisasi ini.

“Harmonisasi ini merupakan tahapan penting untuk memastikan Ranperda RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kepastian hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami di Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen memberikan asistensi agar produk hukum daerah ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dispera KPLH HSS, Ronaldy Prana Putra, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

“Kami menyambut baik fasilitasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel. Ranperda RPPLH ini sangat penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena akan menjadi pedoman utama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, sekaligus memastikan pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, M.Si selaku Peneliti Utama LPPM Universitas Lambung Mangkurat, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan akademisi.

“Universitas Lambung Mangkurat melalui tim peneliti turut berkolaborasi dalam penyusunan RPPLH ini. Kami berharap dokumen yang dihasilkan dapat menjadi acuan ilmiah sekaligus praktis bagi Pemkab Hulu Sungai Selatan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta menghadapi tantangan perubahan iklim ke depan,” tuturnya.

Ranperda RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah agar tetap berwawasan lingkungan, mendukung pengendalian perubahan iklim, serta menjaga kualitas hidup masyarakat.



Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Ranperda RPPLH kepada Pemkab Hulu Sungai Selatan

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara resmi menyerahkan hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Penyerahan dilakukan usai rapat harmonisasi yang dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjahtul Mardhiah, beserta jajaran. Hasil harmonisasi diserahkan langsung kepada Kepala Dispera KPLH Kabupaten HSS, Ronaldy Prana Putra, mewakili Pemerintah Daerah.

Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa hasil harmonisasi ini menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum bagi Pemkab Hulu Sungai Selatan.

“Dengan selesainya tahapan harmonisasi, Ranperda RPPLH HSS kini telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami berharap produk hukum daerah ini dapat segera dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

Kepala Dispera KPLH HSS, Ronaldy Prana Putra, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Kalsel atas fasilitasi dan asistensi yang telah dilakukan. Ranperda RPPLH ini akan menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengarahkan pembangunan daerah agar lebih berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, M.Si selaku Peneliti Utama LPPM Universitas Lambung Mangkurat, menambahkan bahwa dokumen RPPLH HSS telah disusun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi.



“Kami berharap hasil harmonisasi ini memperkuat dasar hukum sekaligus memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam di Hulu Sungai Selatan. Kolaborasi antara Pemkab dan akademisi menjadi kunci untuk memastikan pembangunan daerah tetap ramah lingkungan,” jelasnya.

Dengan penyerahan hasil harmonisasi ini, diharapkan Ranperda RPPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat segera memasuki tahapan pembahasan di DPRD, sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Dorong Daya Saing Daerah, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikut Bimtek Indikasi Geografis BRIN

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Indikasi Geografis (IG) di Provinsi Kalimantan Raya pada Selasa (30/09/2025). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting. Terhubung dari Ruang Rapat TU dan Umum Kanwil, kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, bersama jajarannya.

Dalam kegiatan ini, Analis Kebijakan Ahli Muda BRIN, Riyadil Jinan, menyampaikan paparan mengenai perlindungan dan pemanfaatan Indikasi Geografis. Ia menjelaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk karena faktor lingkungan geografis, baik faktor alam maupun manusia, yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus. Produk IG harus memenuhi kriteria tertentu, di antaranya memiliki karakteristik unik, kualitas yang berbeda dengan produk sejenis, reputasi yang sudah dikenal masyarakat, serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografis yang spesifik.

Riyadil juga menekankan bahwa perlindungan IG bertujuan menjaga kualitas dan standar produk, meningkatkan daya saing, mendorong pembangunan ekonomi daerah, sekaligus melestarikan budaya dan pengetahuan tradisional. IG juga dapat mencegah praktik persaingan curang, melindungi konsumen, memperkuat citra produk lokal, serta memberikan kepercayaan kepada pasar. Dalam paparannya, ia menguraikan tahapan permohonan pendaftaran IG yang dimulai dari inventarisasi produk unggulan daerah, pembentukan kelembagaan masyarakat penghasil produk, penyusunan dokumen deskripsi yang mencakup sejarah, karakteristik, SOP produksi, hingga peta wilayah, sebelum akhirnya diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam pengembangan IG, mulai dari identifikasi potensi produk, pembinaan kelembagaan masyarakat, promosi dan pemasaran, hingga pengawasan kualitas. BRIN juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk BRIDA, dinas teknis, koperasi dan UMKM, hingga sektor pariwisata untuk memastikan keberlanjutan IG. Beberapa produk potensial dari Kalimantan yang disebutkan dalam kegiatan ini antara lain kopi, pala, minyak atsiri, gula, beras, cabai, hingga berbagai hasil hortikultura yang memiliki nilai jual tinggi sekaligus mencerminkan kekayaan geografis daerah.

Melalui paparan ini, peserta bimtek diharapkan semakin memahami strategi pengembangan IG secara menyeluruh, mulai dari validasi data, penguatan organisasi masyarakat penghasil produk, pengawasan kualitas, hingga pengintegrasian IG dengan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Keterlibatan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen Kementerian Hukum untuk memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis, sehingga potensi produk unggulan Kalimantan Selatan dapat lebih dikenal, dilindungi, dan berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti FGD Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penjaminan untuk Dukong Kewirausahaan dan Industri Kreatif

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan ikuti Forum Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penjaminan dalam Rangka Mendukung Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif secara daring, Selasa (30/09) bertempat di Ruang BerAKHLAK Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, para Analis Hukum, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan dan sambutan Kakanwil Bengkulu yang dibacakan oleh Kepala Divisi PPPH, Tongam Renikson Silaban, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dibacakan oleh Kapus Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Dr. Arfan Faiz Muhlizi, sekaligus membuka kegiatan FGD. Pada kesempatan ini, Analis Hukum Ahli Utama, Bambang Iriana Djajaatmadja, memaparkan progres Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penjaminan. Dari hasil sementara, ditemukan empat isu krusial, yakni harmonisasi regulasi dan kebijakan penjaminan dengan asuransi, literasi penjaminan dan pemerataan layanan penjaminan di daerah, ketimpangan portofolio penjaminan, serta kelengkapan ekosistem penjaminan.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu, Dedy Chandra, menyampaikan materi tentang peran Dinas Koperasi UKM dalam menyiapkan UMKM dan Koperasi yang “Bankable”. Dinas berperan melalui fungsi enabling dengan memberikan edukasi dan pelatihan, asistensi legalitas usaha, pendataan UMKM yang siap dibiayai, serta membangun kemitraan dengan BUMD, BUMN, dan lembaga keuangan. Namun demikian, masih terdapat kendala koordinasi dalam penjaminan, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaan.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Kantor PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Provinsi Bengkulu, Randy Leonardus Nababan, yang menyoroti tantangan UMKM dalam keterbatasan akses pembiayaan. Jamkrindo hadir sebagai solusi melalui penjaminan untuk memperluas akses finansial UMKM. Ia juga memberikan rekomendasi kebijakan terkait UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, antara lain dengan mendorong sosialisasi bersama regulator, pelatihan terpadu bagi lembaga penjamin, dan kerja sama co-guarantee antarpemjamin. Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan penutupan resmi oleh Kapus Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Dr. Arfan Faiz Muhlizi.



Hari Terakhir, Kemenkum Kalsel Hadirkan Layanan Hukum di Bamara Fest 2025



Banjarmasin, KI_Info – Memasuki hari terakhir pelaksanaan Bamara Fest 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali membuka layanan publik di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Selasa (30/09/2025) di Halaman Ex Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Tim pelayanan dari Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan kesempatan bagi masyarakat umum, pelaku usaha, hingga perangkat daerah Kota Banjarmasin untuk memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran terkait merek, desain industri, paten, hak cipta, perizinan usaha, serta pendaftaran badan hukum. Layanan ini dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya dan usaha mereka.



Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga selesai ini juga mendapat sambutan positif dari peserta yang hadir, termasuk masyarakat dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin. Antusiasme terlihat dari banyaknya konsultasi yang dilakukan, baik seputar perlindungan karya cipta maupun legalitas usaha.

Tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, Bamara Fest 2025 juga menjadi wadah strategis untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Melalui sinergi antara edukasi, promosi, dan hiburan, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi lokal di Kalimantan Selatan.



Kanwil Kemenkum Kalsel dan Satpol PP Balangan Bahas Perubahan Perda Ketertiban Umum

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala resmi menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, serta pelayanan hukum, Selasa (30/9/2025).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, bersama Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala, M. Haris Isroyani, Ketua Bapemperda DPRD Batola, Hendri Dyah Estiningrum, serta Kabag Persidangan dan Hukum Sekretariat DPRD, Muhammad Yayan.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas.

"Harmonisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah perlu ditopang dengan keahlian teknis perancang peraturan. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD Batola dalam membentuk produk hukum yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Alex.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalsel.

"Dengan adanya kesepakatan dan kerja sama ini, DPRD Batola mendapatkan pendampingan teknis yang sangat penting. Kami optimis kualitas pembentukan peraturan daerah akan semakin meningkat, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Barito Kuala," ungkap Ayu.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala dengan Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel mengenai fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, salah satunya terkait penataan dan pengendalian infrastruktur pasif.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Virtual Sertijab dan Pelepasan Irjen Kementerian Hukum

Banjarmasin, Humas_Info – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara daring acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Pelepasan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Selasa (30/9).

Acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas beserta jajaran tersebut diselenggarakan di Graha Pengayoman Jakarta dan turut dihadiri secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, serta ASN di lingkungan Kementerian Hukum.

Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta seluruh pegawai Kanwil.

Acara Sertijab ini menjadi momen penting dalam rangkaian pergantian kepemimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, sekaligus melepas Irjen. Pol. Reynhard Silitonga yang memasuki masa purnabakti yang digantikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto sebagai pelaksana tugas.

Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat, diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, penyerahan memori jabatan, penayangan video selang pandang, hingga prosesi pelepasan. Dalam kesempatan tersebut, berbagai kesan dan pesan dari jajaran pegawai turut disampaikan, serta sambutan dari Menteri Hukum yang menekankan pentingnya dedikasi dan integritas dalam mengabdikan diri di Kementerian Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, turut menyampaikan penghargaan atas pengabdian Inspektur Jenderal.

“Atas nama jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, kami menyampaikan selamat atas pengabdian yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Reynhard Silitonga. Beliau adalah sosok teladan yang penuh dedikasi dalam menjaga integritas dan tata kelola di Kementerian Hukum. Kami juga mengucapkan terima kasih atas seluruh karya dan kontribusi yang akan selalu menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berkomitmen memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ujar Alex.

Dengan mengikuti kegiatan ini, jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel turut menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran regenerasi kepemimpinan di tingkat pusat serta memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan Kementerian Hukum RI.



Pancasila Perekat Bangsa, Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Kalsel pada Rabu (1/10), dengan tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, dengan peserta yang terdiri dari jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial, Pejabat Non Manajerial, CPNS, hingga PPNPN. Seluruh peserta upacara mengenakan Pakaian Dinas Harian IV.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa hormat, mencerminkan komitmen bersama untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara serta menjaga semangat persatuan bangsa.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa Pancasila adalah landasan utama yang harus senantiasa dipegang teguh oleh setiap aparatur negara.

“Melalui momentum Hari Kesaktian Pancasila ini, kita diingatkan kembali akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. ASN Kementerian Hukum harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja, memberikan pelayanan publik, dan menjadi teladan dalam menjaga keutuhan bangsa,” pesan Alex secara terpisah.

Melalui peringatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan kembali pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja dan mengabdikan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara.



Kanwil Kemenkum Kalsel Matangkan Persiapan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mempersiapkan kesiapan Penilaian Mandiri Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Selasa (30/09/2025).

Rapat persiapan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pembangunan ZI Kanwil, Anton Edward Wardhana bersama jajaran Pokja pembangunan ZI WBK. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem yang memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh tim agar tetap tenang, santai, dan percaya diri dalam menghadapi tahapan wawancara dengan Tim Penilai Mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Anton memaparkan materi presentasi yang akan disampaikan pada tahap penilaian, meliputi identifikasi permasalahan layanan hukum, pemetaan risiko, hingga inovasi unggulan Kanwil seperti AKRAB (Aksi Kemenkum Kalsel Rajin Bagawi), Pustaka Hukum Online (PUSKUMKALSEL), Pos Bantuan Hukum, hingga Digitalisasi Layanan.

Kakanwil menegaskan pentingnya memaksimalkan capaian kinerja yang telah diraih, di antaranya peningkatan PNPB AHU dan KI sebesar 6,19% hingga September 2025, serta kontribusi nyata inovasi layanan jemput bola dalam mendekatkan akses hukum dan keadilan kepada masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel optimis untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Malam Puncak Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-499

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, menghadiri Malam Puncak Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-499 yang digelar di Halaman Balai Kota Banjarmasin pada Selasa malam (30/09/2025).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR, Wakil Wali Kota Ananda, Forkopimda Kota Banjarmasin, serta Ketua dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin.



Rangkaian kegiatan diawali dengan hiburan madihin dan tari kreasi, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penayangan video capaian program kerja Kota Banjarmasin, sambutan-sambutan, prosesi pengautan nasi astakona, hingga berbagai penampilan seni seperti lomba lagu Banjar, peragaan busana, dan hiburan artis.

Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR menyampaikan rasa syukur atas peringatan Hari Jadi ke-499, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, serta mengajak masyarakat untuk menjaga budaya kota dan bersama membangun Banjarmasin yang maju dan sejahtera.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memberikan apresiasi atas terselenggaranya peringatan Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga identitas budaya Banua serta terus mendukung sinergi pembangunan agar Banjarmasin semakin maju, nyaman, dan sejahtera.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman juga turut menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin, mengapresiasi kebersamaan seluruh pihak, serta berharap Banjarmasin terus berkembang sebagai kota yang berbudaya, maju, dan menyejahterakan masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik, meriah, dan penuh kebersamaan, menandai semangat masyarakat dalam menyongsong usia Kota Banjarmasin yang ke-499.

Para Pejabat Manajerial Kemenkum Kalsel Gelar Coffee Morning, Bahas Konsolidasi Kinerja dan Pembangunan ZI

Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, bersama para Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Manajerial menggelar coffee morning di lingkungan Kanwil, Selasa (01/10). Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi internal untuk memperkuat strategi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan dan pelaksanaan kinerja Triwulan IV tahun 2025 ini.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai langkah sinergis antarunit, khususnya kinerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) serta Divisi Pelayanan Hukum, yang menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja kantor wilayah.

Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menyatukan persepsi, memperkuat komitmen, serta memastikan bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel memiliki visi yang sama dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa momentum ini penting sebagai bentuk penyelarasan langkah di awal bulan.

“Coffee morning ini bukan sekadar pertemuan santai, tetapi menjadi ruang konsolidasi yang penting agar kita semua berada dalam satu frekuensi. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM harus kita dorong bersama, dengan memperkuat sinergi kinerja setiap divisi, khususnya Divisi PPPH dan Divisi Pelayanan Hukum yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di Kanwil,” ungkap Alex.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan ZI tidak hanya bergantung pada dokumen dan penilaian, tetapi juga pada budaya kerja yang konsisten, integritas, dan semangat pelayanan yang tulus.



Supervisi Anggaran TA 2026: Kanwil Kemenkum Kalsel Mantapkan Transparansi dan Akuntabilitas



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan tim supervisi dari Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka pelaksanaan Supervisi Tindak Lanjut Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026. Kegiatan ini berlangsung pada 30 September hingga 1 Oktober 2025 di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Supervisi ini menjadi bagian penting dari persiapan penyusunan alokasi anggaran Kementerian Hukum Tahun 2026, dengan fokus pada verifikasi kepatuhan dokumen RKA-K/L, kesesuaian informasi kinerja, serta kualitas alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan supervisi di Kanwil Kemenkum Kalsel didampingi langsung oleh Andia Dani Utomo, Analis Anggaran Ahli Muda dan David Ady Prasetya, Perencana Pertama yang ditugaskan sebagai petugas supervisi dari Biro Perencanaan dan Organisasi.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas pendampingan ini.

“Supervisi ini menjadi bagian penting untuk memastikan dokumen anggaran kita disusun secara akurat, sesuai standar, dan mendukung kinerja Kanwil. Dengan adanya supervisi langsung dari Biro Perencanaan dan Organisasi, kami semakin yakin penyusunan RKA-K/L TA 2026 akan lebih berkualitas, efektif, dan tepat guna dalam mendukung pelayanan hukum di Kalimantan Selatan,” ujar Alex.

Kegiatan supervisi yang diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mengawal pengelolaan anggaran negara agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan adanya pendampingan langsung dari Biro Perencanaan dan Organisasi melalui petugas supervisi, diharapkan seluruh satuan kerja di bawah Kanwil Kemenkum Kalsel dapat menyusun RKA-K/L TA 2026 dengan kualitas yang semakin baik, selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan prioritas pelayanan publik di bidang hukum.

Hasil supervisi ini tidak hanya memperkuat tata kelola perencanaan anggaran, tetapi juga menjadi pijakan bagi Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung tercapainya reformasi birokrasi, efisiensi belanja, serta pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Serah Terima PPPK Tahun 2024, Tandai Langkah Bersama Tingkatkan Layanan Publik



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti rapat Informasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, yang digelar secara daring pada Kamis (25/09/2025).

Rapat ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum sebagai tindak lanjut atas PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 jo. PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024, serta Keputusan Menpan RB Nomor 194 Tahun 2025 mengenai Instansi Pelaksana Evaluasi Zona Integritas secara mandiri. Kegiatan juga mengacu pada Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-2.OT.03.02 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Mandiri (TPM) ZI Kementerian Hukum.

Kanwil Kemenkum Kalsel hadir dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang juga selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkum Kalsel, didampingi masing-masing ketua Pokja WBK dan tim.

Berdasarkan surat edaran TPM, pelaksanaan penilaian akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu Desk Wawancara pada 29 September – 3 Oktober 2025 serta Verifikasi Lapangan pada 6–9 Oktober 2025. Kanwil Kemenkum Kalsel sendiri dijadwalkan mengikuti Desk Wawancara pada Kamis, 2 Oktober 2025 dan Verifikasi Lapangan pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Melalui keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmen dalam implementasi nyata bukan sekedar sebagai aspek penilaian WBK, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Tanah Laut tentang Penyertaan Modal ke Bank Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanah Laut tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), pada Selasa (1/10/2025) bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, bersama tim harmonisasi Kanwil Kemenkum Kalsel.

Hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, antara lain Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Cabang Bank Kalsel Pelaihari, serta Bagian Hukum Setda Tanah Laut.

Dalam rapat, tim harmonisasi bersama perangkat daerah membahas pasal demi pasal secara rinci. Beberapa ketentuan mendapat perhatian khusus untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut agar selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel (Perseroda) dapat segera difinalisasi sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah.



Harmonisasi Ranperbup Beasiswa, Kanwil Kemenkum Kalsel Dampingi Pemkab Hulu Sungai Tengah

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Hulu Sungai Tengah (HST) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat, Rabu (1/10) di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalsel.

Jalannya rapat dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, dengan menghadirkan pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dari pihak Kabupaten HST, rapat dihadiri oleh Asisten I Setda Kabupaten HST, Zamhasari, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar beserta jajaran. Kehadiran unsur Pemkab ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat regulasi yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan masukan substansi maupun teknis penyusunan peraturan, agar Ranperbup yang mengatur pemberian beasiswa dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta implementatif di lapangan. Ranperbup ini juga dimaksudkan untuk memperjelas kriteria penerima, mekanisme seleksi, serta tata cara penyaluran beasiswa, sehingga dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan Ranperbup Beasiswa HST mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu maupun berprestasi. Hal tersebut sejalan dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa harmonisasi Ranperbup ini sangat penting agar setiap regulasi yang lahir di daerah memiliki kepastian hukum, selaras dengan aturan yang lebih tinggi, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

“Kami mendukung penuh langkah Pemkab Hulu Sungai Tengah dalam memberikan perhatian pada dunia pendidikan melalui program beasiswa, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah,” ujar Alex Cosmas Pinem.



Penguatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Koordinasi DJKI



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Koordinasi Penguatan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi dan Sentra KI di Wilayah pada Rabu (01/10/2025) secara virtual.

Dari Balai Pertemuan BerAKHLAK Kantor Wilayah, kegiatan ini langsung diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, bersama jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan agenda utama pemutakhiran data pengelolaan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi serta penguatan peran Kantor Wilayah dalam melakukan pembinaan terhadap Sentra KI di daerah.

Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Perguruan Tinggi, Sentra KI, dan Kanwil Kementerian Hukum semakin optimal dalam mendukung peningkatan pendaftaran dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di daerah.



Kakanwil Kemenkum Kalsel Tinjau Progres Pembangunan Gedung Baru di Banjarbaru



Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) terus memantau progres pembangunan lanjutan gedung kantor pada Tahun Anggaran 2025. Memasuki minggu ke-4, tim Kanwil bersama kontraktor, konsultan perencana, serta pihak terkait meninjau langsung perkembangan pengerjaan di lokasi proyek, Rabu (1/10/2025).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, Kepala Bagian TU dan Umum Rustam Sakka, Pejabat Pembuat Komitmen Eko Herdianto, serta jajaran teknis bersama kontraktor Patmo Suryo Wiharto dan konsultan perencana Teddy Permana.



Dalam keterangannya, Kakanwil Alex Cosmas Pinem menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan kerja serta risiko yang mungkin timbul di lapangan.

“Pekerjaan pembangunan harus berjalan sesuai target, namun keselamatan dan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, mitigasi risiko perlu terus dilakukan agar pengerjaan tidak menimbulkan hambatan di kemudian hari,” ujarnya.

Pembangunan lanjutan gedung Kanwil Kemenkum Kalsel ini diharapkan dapat selesai sesuai rencana dan memberikan dukungan optimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum di Kalimantan Selatan.

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Rancangan Regulasi Kabupaten HSU



Banjarmasin, Humas_Info – Pada Kamis, 2 Oktober 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi terkait dua rancangan regulasi usulan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), yakni Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2017 mengenai denda keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta Ranperbup tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi DPRD dan ASN Kabupaten HSU.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, didampingi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Nizar Alfariy, bersama tim perancang Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemkab Hulu Sungai Utara hadir Burhanuddin, Kabid Anggaran BPKAD HSU; M. Syarif Fajerian Noor, Sekretaris Dewan DPRD HSU; Rusni, Kabag Hukum Setda HSU; serta jajaran Bagian Hukum Setda HSU.

Dalam rapat tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel menekankan pentingnya proses harmonisasi sebagai langkah memastikan keselarasan rancangan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2017 diajukan karena substansinya sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sementara Ranperbup Perjalanan Dinas disusun untuk menyesuaikan dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Terkait hal tersebut, Kadiv P3H Anton Edward Wardhana menyampaikan penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Proses harmonisasi ini bukan hanya formalitas, tetapi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2017 dan penyesuaian aturan perjalanan dinas melalui Ranperbup, kita ingin menghadirkan regulasi yang akuntabel, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ungkapnya.

Hasil dari rapat ini diharapkan memperkuat kualitas produk hukum daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pajak, retribusi, maupun tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Desk Evaluasi Wawancara Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Bersama TPM



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti desk wawancara Penilaian Mandiri Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kamis (2/10), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel. Desk evaluasi dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri (TPM) secara daring.

Desk wawancara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, bersama tim, dengan menekankan komitmen perubahan melalui moto Si Haruan – Siap HARmoni untuk pembaharuan. Dalam paparannya, Kakanwil menyampaikan sejumlah inovasi unggulan yang dijalankan Kanwil Kemenkum Kalsel, di antaranya AKRAB (Aksi Kemenkum Kalsel Rajin Bagawi) sebagai layanan jemput bola di bidang hukum, kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum; PUSKUM KALSEL, yaitu perpustakaan hukum online untuk memperluas literasi hukum; serta penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) agar akses layanan bantuan hukum menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.

Selain menampilkan inovasi, paparan juga menyoroti capaian kinerja, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta kontribusi nyata dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Kakanwil juga menyatakan komitmen dalam pembangunan Zona Integritas melibatkan seluruh jajaran meningkatkan kinerja organisasi melalui perbaikan dalam enam area perubahan yang menjadi aspek penilaian satuan kerja.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, didukung dokumentasi serta data capaian kinerja Kanwil. Dengan terselenggaranya desk wawancara ini, Kanwil Kemenkum Kalsel optimis upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK dapat terwujud, sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan.



Kemenkumham Raih Opini WTP ke-16, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Penyerahan LHP BPK Tahun 2024



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini diikuti secara virtual pada Jumat (3/10) dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta pejabat pengelola keuangan dan BMN Kantor Wilayah.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi tahapan akhir pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2024, sekaligus bertujuan sebagai ruang komunikasi tindak lanjut rekomendasi serta evaluasi pengelolaan keuangan dan BMN untuk memperkuat koordinasi lintas unit dan instansi.

Agenda utama ditandai dengan penyerahan LHP BPK kepada Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Menteri HAM serta apresiasi atas penyelesaian rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK diatas 90% oleh Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Hukum dan HAM yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut. “Opini ini menunjukkan komitmen dalam perbaikan tata kelola entitas dan penerapan prinsip good governance menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Menteri Hukum dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim pemeriksa BPK RI. “Kami berharap seluruh permasalahan pengelolaan BMN dapat segera diselesaikan sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut dari BPK, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terus terjaga,” ucapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, yang turut hadir bersama jajaran, turut menyatakan komitmennya dalam memastikan pengelolaan keuangan dan BMN di wilayah terlaksana dengan baik. “Prestasi opini WTP ke-16 ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama. Kanwil Kemenkum Kalsel siap memastikan pengelolaan keuangan dan BMN di wilayah berjalan transparan, akuntabel, serta mendukung kinerja organisasi,” ungkapnya. Dengan capaian ini, Kementerian Hukum kembali menegaskan konsistensi dalam pengelolaan keuangan negara yang kredibel serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi.



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[@kemenkumkalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](#)